



Listrik Byarpet

Heri Priyatmoko

Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma; Pemrakarsa Solo Societeit

Hari-hari ini, negara Indonesia berlayar menuju "kegelapan". Gonjang-ganjing perkara listrik menggambarkan situasi buruk tersebut tampak nyata di depan muka. Masyarakat ajeg membayar pajak listrik dan apabila telat bakal menuai denda, bahkan dicabut tanpa ampun. Namun, saat terjadi pemadaman dan mengganggu aktivitas pengguna, alih-alih memohon maaf, pemerintah meminta untuk memaklumi.

Urusan pemadaman listrik sukar dinormalisasi dalam sejarah peradaban manusia modern. Tengok saja lembaran sejarah sosial di tanah Hindia Belanda. Negeri jajahan mulai dialiri listrik pada pengujung abad XIX. Tercatat, baru pada 1897 listrik mulai dikonsumsi umum di bumi koloni yang dimotori NV *Nederland-Indische Gas Maatschappij* (NIGM) di Batavia. Mula-mula, perusahaan swasta Belanda ini hanya memasok gas untuk umum. Lalu, melebarkan sayap bisnis pada sektor listrik untuk kepentingan publik.

Kemudian, muncul NV *Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij* (NV ANIEM). Perusahaan ini memegang konsesi untuk Pontianak, Singkawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Wasingo, 2013). Waktu bergulir cepat, pada 1901 di Kota Solo hadir *Solosche Electriciteits Maatschappij* (SEM) demi memenuhi desakan pembesar kerajaan dan perusahaan perkebunan yang berkecambah di wilayah sekitarnya. Di tahun itu, akta pendirian SEM ditandatangani di Batavia dengan melibatkan perwakilan dari pihak Belanda, Keraton Kasunanan, Praja Mangkunegaran, serta komunitas Tionghoa (Eko Sulisty, 2021).

Unsur listrik kadung masuk ke jantung peradaban, masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan kerajaan sampai memiliki terminologi yang spesifik untuk melukiskan teknisnya aliran listrik semen-

tara waktu, yaitu oglangan. Ketergantungan manusia akan energi listrik di tanah koloni tak selamanya bernada positif. Sekalipun pemadaman cuma dalam hitungan menit, tetap saja oglangan merupakan sisi gelap kemajuan teknologi yang dikuasai oleh pemerintah (kolonial).

Ungkapan Jawa yang lebih umum ialah byarpet. Jika oglangan dikarenakan setrum listrik mati, byarpet lantaran lampu atau bolam mulai rusak, sakelar tak lagi berfungsi, kabel putus, ataupun gangguan pada aliran listrik akibat kecelakaan atau kesengajaan. *Jurnal Pemandangan* pada 3 Oktober 1936 mengabarkan seorang pemabuk mengendarai mobil menabrak rumah transformator listrik. Buahnya, seluruh desa di malam hari gelap, berhari-hari tiada lampu listrik menyala. Beberapa perusahaan pun berhenti beroperasi.

Pekamus *Poerwadarminta* dalam *Bausastra Jawa* (1939) membubuhkan lema "byar-pEt", yang mengandung arti *gEk murub gEk mati*. Terjemahan bebasnya: lekas nyala, lekas mati untuk lampu. Gericke dan Roorda mengikutkan sepenggal kata "pet" di *Jawaansch-Nederlandsch Handwoordenboek* (1901). Artinya, cahaya (lampu) padam tiba-tiba dan sepenuhnya.

Para penekun bahasa itu tidak asal menaruh terminologi lokal tanpa menimbang kenyataan sosial yang diamati ataupun dialaminya di tanah jajahan. Di samping menyediakan petunjuk spasial dan temporal, linguistik pribumi dan Eropa ini meyakinkan segenap pembaca tempo itu untuk memahami dinamika sosial yang berkelindan dengan teknologi ciptaan manusia. Musti diingat, periode itu listrik menyentuh kalangan elite dan kaum berduit saja, juga menemani jalanan *kutha raja*.

Warung di bibir jalan masih banyak yang memakai minyak untuk penerangan. Dalam ri-

set disertai, saya menemukan sejumlah kesaksian sastrawan Achdiat Karta Mihardja kala bersekolah di *Algemeene Middelbare School* (AMS) bagian A-1 Jurusan *Oostersch Letterkunde* (Sastra Timur) di Surakarta pada 1927. Ia mengisahkan teman sekelasnya, sastrawan Amir Hamzah, sebagai pengelana malam. "Amir jang suka mentjari romantik dibawa sinar merah dan hidjau lampu minjak tanah jang kelap-kelip bergantung di warung-warung kopi," katanya.

Perlawanan

Bukan berarti kolonial Belanda yang memonopoli listrik sepi dari perlawanan. Akibat lonjakan tarif listrik yang semena-mena, etnis Tionghoa mengambil sikap. Ancaman pemadaman tidak dihiraukan. Mereka emoh membayar pajak, kemudian di rumahnya menyala petromaks yang hanya menelan biaya beberapa sen saja untuk pembelian minyak. Juru warta melaporkan bahwa sejumlah pemilik restoran dan toko melakukan hal serupa dengan sukacita (*Pemandangan*, 5 Oktober 1934).

Ketergantungan sekaligus sikap kritis terhadap bisnis listrik telah dibedah sejak di bangku MULO dan berlanjut di AMS. Lewat mata pelajaran Fisika, siswa di kelas VI mempelajari Ilmu Listrik, yang disertai praktik apabila sarannya memungkinkan. Dilambiri spirit nasionalisme, mereka memahami pula makna dari monopoli energi (listrik) oleh kaum penjajah. Kemerdekaan dan kemandirian ekonomi, termasuk pengadaan listrik oleh bangsa sendiri, sungguh penting.

Ternyata, setelah seabad berlalu, delapan dekade merdeka, dan listrik sudah dikelola oleh Pemerintah Indonesia, tidak menjamin masyarakat terbebas dari byarpet atau oglangan. Malah yang diperoleh warga adalah ketidakadilan antara hak dan kewajiban.

Oalah, lelakon....